



Analisa Realisasi Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 – 2022

Mutia Shafa Sejati¹, Sonny Fransisco Siboro², Nanda Apriliyani³, Savika Aulia⁴

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

Korespondensi penulis: mutiassjti@gmail.com

Abstract. When it comes to the management of any institution including the government, the budget and the Budget Realisation Report (BRA) are two important components. For the purpose of evaluating the government's financial performance, the published LRA can provide important information. The LRA financial statements, which show the realisation of revenues, expenditures, and financing, can be used to test the content of the document. The purpose of this study is to determine and evaluate the realisation of the Depok City Government's expenditure budget in 2021-2022. In this study, a descriptive quantitative methodology is used, using analytical methods such as expenditure variance analysis, growth, compatibility, and efficiency. The results of the analysis show that there will be a considerable increase in the expenditure growth ratio in 2022, as well as an increase in expenditure realisation and variance. The Depok City Government has managed its expenditure effectively in this regard.

Keywords: Budget, BRA, Effective

Abstrak. Dalam hal pengelolaan lembaga manapun termasuk pemerintah, anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah dua komponen penting. Untuk tujuan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah, LRA yang dipublikasikan dapat memberikan informasi penting. Laporan keuangan LRA, yang menunjukkan realisasi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, dapat digunakan untuk menguji isi dokumen tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Depok tahun 2021-2022. Dalam penelitian ini, digunakan metodologi kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan metode analisis seperti analisis varians belanja, pertumbuhan, keserasian, dan efisiensi. Dari hasil analisis terlihat bahwa akan ada peningkatan yang cukup besar dalam rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2022, serta peningkatan realisasi dan varians belanja. Pemerintah Kota Depok telah mengelola pengeluarannya secara efektif dalam hal ini.

Kata kunci : Anggaran, LRA, Efektif

LATAR BELAKANG

Dalam era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang semakin meningkat seperti sekarang ini, membuat masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih di era reformasi dan otonomi daerah. Agar transparan, seluruh keuangan dan anggaran pemerintah harus mengikuti ketentuan pencatatan Sistem Akuntansi Sektor Publik (Petra and Sari 2021). Menjaga stabilitas dan kemakmuran suatu daerah sangat bergantung pada kinerja keuangan daerah tersebut. Menurut Siti Amelia dalam Heriristam (2015), Kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya sendiri untuk mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat tercermin dalam kinerja keuangan daerah (Amelia 2022). Dalam Kerangka ini, pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat dipandang sebelah mata.

Hasil dari pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah sesuai dengan indikator keuangan yang ditetapkan dalam kebijakan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku dalam suatu tahun anggaran tertentu menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menandakan bahwa penilaian terhadap kinerja keuangan daerah tidak hanya bergantung pada pencapaian dalam penerimaan dana tetapi juga dalam penggunaannya untuk kepentingan masyarakat daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan catatan pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk meningkatkan output dan memperluas ekonomi untuk mencapai kemakmuran masyarakat, APBN dibuat sebagai peta jalan untuk pendapatan dan pengeluaran negara. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah digunakan untuk menyusun anggaran. Laporan Keuangan dalam pemerintah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Siti Amelia dalam Ratmono, d. & Sholihin (2019:25), Bagian dari laporan keuangan pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang membandingkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran dengan apa yang sebenarnya dibelanjakan untuk tahun fiskal tertentu. Data mengenai kinerja keuangan daerah termasuk dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang dirilis oleh pemerintah (Amelia 2022).

Anggaran adalah rencana tertulis yang menguraikan operasi organisasi dalam bentuk angka untuk periode waktu tertentu. Biasanya diwakili dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dinyatakan dalam bentuk produk atau layanan (Susanti A, Riadi S, and Sari D 2021). Anggaran dalam akuntansi sektor publik merupakan rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah atau entitas sektor publik lainnya guna untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan uang dalam suatu periode tertentu. Dalam hal ini, anggaran mencakup pada beberapa proyek atau kegiatan yang dibiayai oleh pendapatan. Pendapatan tersebut diperoleh melalui pajak, pungutan dan sumber pendapatan lainnya. Tujuan anggaran dalam akuntansi sektor publik yaitu untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi. Termasuk dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengukur kinerja keuangan, meningkatkan akuntabilitas serta mendukung pengambilan keputusan yang informasional. Dalam proses anggaran sendiri, terdiri dari beberapa tahap, langkah awal dalam proses membuat anggaran adalah perencanaan terkait dengan dana-dana yang sekiranya akan dikeluarkan. Selanjutnya adanya penyusunan budgeting serta pelaksanaan dalam kegiatan atau rencana

yang telah ditentukan. Pada tahap akhir dalam proses ini dilakukannya pemantauan dan evaluasi terkait kinerja serta anggaran yang keluar, apakah anggaran tersebut melebihi atau kurang dari budgeting yang sudah diperkirakan serta dicatat.

Untuk mencegah terjadinya pemborosan atau salah sasaran dalam penggunaan anggaran, Pemerintah Kota Depok diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang mengevaluasi apakah anggaran tersebut telah direalisasikan dengan baik atau tidak.

Laporan realisasi anggaran pemerintah kota Depok memasukkan belanja sebagai salah satu elemen penting yang dapat menunjukkan bagaimana kinerja keuangan dikelola. Karena belanja merupakan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah dan rentan terhadap kebocoran, maka pengawasan terhadap belanja daerah menjadi sangat penting. Anggaran harus dicatat dalam LRA setelah digunakan. Laporan ini akan diperiksa untuk memberikan informasi untuk penilaian dan perbaikan di masa mendatang.

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rachmad Chartady, Vanisa Meifari, Tiara Wulandari dan Ranti Utami dengan judul “Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)” pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. Namun pada penelitian ini, penulis meneliti terkait dengan anggaran Pemerintah Kota Depok pada tahun 2021-2022.

KAJIAN TEORITIS

1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Susanti et al. (2021), “Akuntansi sektor publik menawarkan berbagai layanan, termasuk pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan berbagai peristiwa atau transaksi ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan data keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak terkait untuk membuat penilaian tentang administrasi keuangan publik, baik di lembaga-lembaga negara maupun departemen-departemen yang bertanggung jawab kepada mereka” (Susanti A et al. 2021).

Yuliyanto et al. (2022) mengatakan “Akuntansi sektor publik bertujuan untuk menyajikan informasi secara transparan kepada publik dapat terpenuhi. Fokus utama dalam akuntansi sektor publik adalah memeriksa dan mengevaluasi sistem akuntansi yang sudah ada. Akuntansi sektor publik memiliki standar tersendiri yang harus diikuti, serta mengikuti standar yang telah ditetapkan. Pengembangan sistem akuntansi sektor publik dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja sektor publik yang melakukan penekanan

pada manajemen dan pengelolaan keuangan yang efektif sebagai prioritas utama. Proses penyusunan informasi juga memerlukan keterlibatan akuntansi sektor publik untuk mencapai consensus di antara semua pihak yang terlibat” (Yuliyanto, Uswatun Khasanah, and Riza Umami 2022). Akuntansi untuk sektor publik sangat penting untuk pelaksanaan banyak tugas pemerintah, seperti pelaporan keuangan dan manajemen (Bagiana 2020). Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat tentang penggunaan dana publik serta kinerja dalam mencapai tujuan publik yang melibatkan pencatatan, pelaporan, dan analisis yang terjadi dalam sektor publik. Adapun jenis akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

a. Akuntansi Keuangan Publik

Akuntansi ini melibatkan pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan publik, seperti pemerintah, dan organisasi nirlaba yang menerima dana publik

b. Akuntansi Manajemen Publik

Akuntansi ini berpusat pada bagaimana data keuangan digunakan secara internal untuk mengambil keputusan pada sektor publik, seperti sumber daya dan perencanaan anggaran.

c. Akuntansi Pemerintahan

Melibatkan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan entitas pemerintah, serta kewajiban yang terkait dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Peran utama akuntansi pemerintahan seringkali terfokus pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara dan penyampaian laporan tentang realisasi (Chartady et al. 2022).

Sarsiti dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2020), perkembangan akuntansi sektor publik menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kinerja sektor publik secara keseluruhan. Untuk mencapai hal ini, diperlukannya adopsi dari berbagai praktik dan Teknik manajemen yang telah terbukti berhasil di sektor swasta. Praktik-praktik tersebut mencakup pengadopsian mekanisme pasar, peningkatan kompetensi dalam proses tender serta pelaksanaan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan publik. Contoh perubahan yang signifikan dalam sektor publik adalah transisi dari sistem akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi yang berbasis akrual. Perubahan tersebut pertama kali di uji coba dalam laboratorium kecil yang berada di Selandia Baru pada tahun 1991 dan berhasil dianggap sebagai langkah yang paling sukses dan bermutu. Keberhasilan ini kemudian diikuti oleh beberapa negara di Eropa dan Italia (Sarsiti 2017).

2. Anggaran

Manajemen menetapkan tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam pernyataan misi dan visi organisasi. Proses penyusunan rencana kegiatan operasional, yang disiapkan dalam satuan moneter dan biasanya direpresentasikan dalam bentuk anggaran, adalah cara organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. (Kaharti 2019).

Menurut Johan Arifin dalam Jones dan Pendlebury (2010), anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan yang mencerminkan kebijakan yang telah terpilih oleh pihak manajemen. Hal ini mencakup dokumen yang merangkum harapan atau keinginan dari penyusun anggaran yang diharapkan akan terwujud ketika anggaran tersebut diimplementasikan. Kegagalan dalam memenuhi anggaran dapat mengakibatkan frustrasi bagi pihak penyusun anggaran atau manajemen, karena hal tersebut akan menyimpang dari harapan atau keinginan awal yang telah ditetapkan (Johan Arifin 2017).

Salah satu contoh anggaran adalah anggaran dalam akuntansi sektor publik. Menurut Anggraeni et al. dalam Mardiasmo (2009:63), anggaran dalam sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yang penting, diantaranya :

- a. Untuk mengembangkan tujuan dan sasaran kebijakan yang sejalan dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan, anggaran digunakan sebagai instrumen perencanaan. Untuk mencapai tujuan organisasi, hal ini memerlukan penyusunan anggaran dan perencanaan kegiatan serta pemrograman.
- b. Anggaran berfungsi sebagai mekanisme kontrol dengan menyediakan jadwal penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara menyeluruh, yang menjamin bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ada kemungkinan lebih besar terjadi pengeluaran yang tidak perlu jika tidak ada anggaran.
- c. Anggaran adalah instrumen kebijakan fiskal yang menstabilkan dan mendorong ekspansi ekonomi. Hal ini memerlukan pemilihan cara mengarahkan kebijakan fiskal di dalam pemerintah sehingga estimasi dan proyeksi ekonomi dapat dibuat.
- d. Anggaran digunakan sebagai instrumen politik untuk menetapkan permintaan dan prioritas keuangan serta untuk menunjukkan dukungan legislatif dan eksekutif atas penggunaan uang publik.
- e. Mendorong kerja sama dan komunikasi di antara berbagai kelompok penyusunan anggaran. Penyimpangan dari pencapaian tujuan organisasi dapat dideteksi melalui anggaran yang efisien.

- f. Sebagai alat evaluasi kinerja, di mana efektivitas penggunaan dana yang dialokasikan oleh para manajer dan eksekutif publik dievaluasi dalam kaitannya dengan pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan.
- g. Alat motivasi digunakan untuk menginspirasi manajemen dan staf perusahaan agar dapat bekerja dengan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisitas yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan optimal (Anggraeni, Erina, and Effendi 2020).

3. Laporan Keuangan

Menurut Sarsiti (2020) “Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memanfaatkan informasi keuangan. Dokumen ini tidak hanya dipergunakan oleh pihak internal perusahaan, tetapi juga oleh pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap data keuangan tersebut.”(Sarsiti 2017). Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari prosedur akuntansi. Dengan cara ini, semua transaksi moneter dipantau dan dikelola. Selain itu, nilai moneter laporan akhir juga ditampilkan (Dinanty et al. 2023). Menurut Amelia et al. (2023), “Dalam upaya membantu pengguna dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya, laporan keuangan dibuat dengan tujuan memberikan informasi yang detail dan komprehensif mengenai status keuangan perusahaan. Ini mencakup informasi mengenai hasil operasi, arus kas, pelaksanaan anggaran, surplus anggaran, dan perubahan ekuitas. Selain itu, laporan keuangan juga membantu dalam aktivitas peramalan dan prognosis dengan menyediakan data yang relevan untuk menentukan sumber daya yang diperlukan guna menjaga kelangsungan operasi bisnis serta untuk mengidentifikasi risiko yang terlibat” (Amelia, Nursyahbani, and Bharata 2023).

4. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Armono et al. dalam Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014), Laporan realisasi anggaran merupakan dokumen yang mencatat secara rinci sumber dan penggunaan dana publik yang dikelola oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dokumen ini memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana dana publik tersebut dihimpun dan digunakan oleh pemerintah (Armono and Widiyaningsih 2020). Pendapatan, pengeluaran, dan status keuangan bisnis yang sebenarnya dibandingkan dengan anggaran dalam laporan realisasi anggaran. (Sarsiti 2017). Laporan realisasi anggaran juga mencakup dokumen yang memuat

informasi tentang penggunaan anggaran atau dana secara faktual selama periode tertentu. Laporan ini juga mencakup detail-detail pengeluaran, penerima, dan saldo anggaran yang digunakan dalam suatu program atau instansi dalam rangka mengevaluasi kinerja keuangan tersebut. Laporan realisasi anggaran memberikan data yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah uang yang akan diperoleh untuk membiayai kegiatan pemerintah di masa yang akan datang dengan menyediakan laporan secara komparatif (Dinanty et al. 2023). Menurut Adapun penyusunan dalam laporan realisasi anggaran, yaitu :

- a. Perbandingan kinerja anggaran dan realisasi keuangan menjadi prioritas pengelola wilayah karena laporan tersebut merupakan instrument utama untuk mengevaluasi hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Perbandingan antara anggaran kas dan kinerja realisasi keuangan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang arus masuk dan arus keluar dana.
- c. Tabel yang membandingkan anggaran untuk setiap kategori pengeluaran menunjukkan perbandingan antara struktur anggaran dan realisasi keuangan berdasarkan pengeluaran.
- d. Grafik realisasi keuangan bulanan dari setiap program mencoba untuk menggambarkan jumlah realisasi keuangan atau anggaran yang telah terjadi selama setiap periode. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren pengeluaran, yang memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
- e. Membandingkan pencapaian keuangan dengan kinerja aset secara aktual, dengan fokus pada pentingnya laporan anggaran yang mencerminkan proses kinerja yang telah terjadi, merupakan suatu tindakan yang sangat diperlukan (Febriana and Narastri 2023).

5. Belanja Daerah

Segala pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan dikembalikan oleh pemerintah daerah, diidentifikasi sebagai belanja daerah (Yusni and Ndiak 2017). Belanja daerah harus dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, serta dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Memenuhi kebutuhan publik, memajukan pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tiga tujuan mendasar dari belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif secara mendetail melalui pengumpulan data yang dihasilkan dari realitas empiris atau keadaan yang sebenarnya. Metode ini menekankan pada penggunaan angka dan statistik untuk menggambarkan fenomena yang diamati dengan akurat. Data yang diperoleh dari penelitian ini bersifat sekunder yang didapatkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2022.

1. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Depok adalah:

a. Analisis Varians Belanja

Menurut Chartady et al. (2022), analisis varians belanja merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara realisasi dengan anggaran belanja (Chartady et al. 2022). Berikut adalah rumus untuk menghitung varians belanja :

Varians Belanja : Realisasi Belanja - Anggaran

Sumber : Mahmudi (2010:157)

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Menurut Chartady et al. (2022), memahami perubahan pengeluaran dari tahun ke tahun dapat diperoleh dengan menggunakan analisis pertumbuhan pengeluaran. Analisis ini memberikan gambaran yang menyeluruh dan tepat tentang bagaimana pengeluaran berubah dari waktu ke waktu. Berikut adalah rumus untuk menghitung pertumbuhan belanja :

Realisasi Belanja tahun t

$$: \frac{\text{Realisasi Belanja tahun } t - \text{Realisasi Belanja tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja tahun } t-1}$$

Sumber : Mahmudi (2010:160)

c. Analisis Keserasian Belanja

Menurut Chartady et al. (2022), analisis keserasian belanja dapat membantu dalam menilai keseimbangan pengeluaran yang terkait dengan peran anggaran dalam distribusi, alokasi serta stabilisasi dana (Chartady et al. 2022).

a) Analisis belanja operasi terhadap total belanja

Analisis ini menghitung perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini menampilkan persentase dari keseluruhan pengeluaran yang masuk ke dalam biaya operasional untuk tahun fiskal tertentu (Chartady et al. 2022). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\textbf{Realisasi Belanja Operasi} : \frac{\textit{Total Belanja Operasi}}{\textit{Total Belanja}}$$

Sumber : Mahmudi (2010:164)

b) Analisis belanja modal terhadap total belanja

Analisis ini menghitung perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja secara keseluruhan. Rasio ini memberikan informasi penting tentang porsi anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek modal dalam satu tahun fiskal (Chartady et al. 2022). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\textbf{Realisasi Belanja Modal} : \frac{\textit{Total Belanja Modal}}{\textit{Total Belanja}}$$

Sumber : Mahmudi (2010:164)

d. Analisis Efisiensi Belanja

Menurut Chartady et al. (2022), analisis efisiensi belanja melakukan perbandingan antara realisasi dan anggaran belanja yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran (Chartady et al. 2022). Untuk menghitung efisiensi belanja, berikut adalah rumus yang digunakan :

$$\textbf{Realisasi Efisiensi Belanja} : \frac{\textit{Realisasi Belanja}}{\textit{Anggaran Belanja}}$$

Sumber : Mahmudi (2010:166)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 Analisis varians belanja Kota Depok tahun 2021-2022

| Tahun | Realisasi (Rp) | Anggaran (Rp) | Selisih | % |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 2021 | 3.267.620.863.110 | 3.676.759.990.653 | -409.139.127.543 | -11,1 |
| 2022 | 3.614.127.822.783 | 4.085.798.603.733 | -471.670.780.950 | -11,5 |

Sumber : CALK Kota Depok 2021-2022

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa selisih anggaran dan realisasi Kota Depok terbesar ada pada tahun 2022 dengan jumlah Rp 471.670.780.950 dan persentase sebesar 11,5%. Pada tahun 2022, adanya kenaikan varians 0,4% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 2 Analisis rasio pertumbuhan belanja Kota Depok tahun 2021-2022

| Jenis Belanja | Realisasi | | Pertumbuhan | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|
| | 2022 | 2021 | Kenaikan | % |
| Operasi | 2.669.375.630.106 | 2.487.459.718.159 | 181.915.911.947 | 7,31 |
| Modal | 906.347.683.570 | 701.368.258.472 | 204.979.425.098 | 29,22 |

Sumber : CALK Kota Depok 2021-2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2022 secara keseluruhan mengalami kenaikan pertumbuhan. Kenaikan terbesar pada pertumbuhan belanja Kota Depok terdapat di belanja modal sebesar Rp 204.979.425.098 dengan persentase sebesar 29,22%.

Tabel 3 Analisis belanja operasi terhadap total belanja Kota Depok tahun 2021-2022

| Tahun | Belanja Operasi (Rp) | Total Belanja (Rp) | Rasio (%) |
|-------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 2021 | 2.487.459.718.159 | 3.188.827.976.631 | 78 |
| 2022 | 2.669.375.630.106 | 3.575.723.313.676 | 74,7 |

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa adanya penurunan rasio pada tahun 2022. Rasio tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar 78% dan rasio terendah terdapat pada tahun 2022 sebesar 74,7%.

Tabel 4 Analisis belanja modal terhadap total belanja Kota Depok tahun 2021-2022

| Tahun | Belanja Modal (Rp) | Total Belanja (Rp) | Rasio (%) |
|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 2021 | 701.368.258.472 | 3.188.827.976.631 | 22 |
| 2022 | 906.347.683.570 | 3.575.723.313.676 | 25,3 |

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa adanya kenaikan rasio pada tahun 2022. Rasio tertinggi terdapat pada tahun 2022 sebesar 25,3% dan rasio terendah terdapat pada tahun 2021 sebesar 22%.

Tabel 5 Analisis rasio efisiensi belanja Kota Depok tahun 2021-2022

| Tahun | Realisasi Belanja | Anggaran Belanja | Persentase |
|-------|-------------------|------------------|------------|
|-------|-------------------|------------------|------------|

| | (Rp) | (Rp) | (%) |
|------|-------------------|-------------------|------|
| 2021 | 3.267.620.863.110 | 3.676.759.990.653 | 88,9 |
| 2022 | 3.614.127.822.783 | 4.085.798.603.733 | 88,5 |

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa rasio efisiensi belanja mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar 0,4%. Pada tahun 2021 rasio efisiensi lebih besar yaitu 88,9% dibandingkan dengan rasio efisiensi pada tahun 2022 yaitu sebesar 88,5%.

Pembahasan

Analisis Varians Belanja

Pada anggaran tahun 2021-2022, terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasinya yang bersaldo negatif. Saldo tersebut menunjukkan adanya penghematan anggaran dalam belanja. Pada tahun 2021, penghematan anggaran dalam belanja sebesar Rp 409.139.127.543 dengan persentase sebesar 11,1%. Sedangkan pada tahun 2022, penghematan anggaran dalam belanja sebesar Rp 471.670.780.950 dengan persentase sebesar 11,5%.

Pemerintah Kota Depok telah memanfaatkan anggaran dengan baik. Dalam hal ini, pengeluaran aktual Pemerintah Kota Depok kurang dari jumlah yang dianggarkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah memanfaatkan APBD dengan baik dalam analisis varians belanja.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Pada tahun 2022 adanya kenaikan pertumbuhan belanja modal sebesar Rp 204.979.425.098 dengan persentase 29,22%. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Depok menggunakan anggaran belanja modal yang terbesar untuk modal jalan, irigasi serta jaringan sebesar Rp 426.199.356.931 dengan persentase 47,02%. Untuk anggaran selanjutnya digunakan untuk Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp 231.921.186.010 dengan persentase 25,59%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 126.331.899.297 dengan persentase 13,94%, Belanja Modal Tanah sebesar Rp 90.531.046.261 dengan persentase 9,99% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 31.364.195.071 dengan persentase 3,46% (Pemerintah Kota Depok 2022).

Analisis KecerAsian Belanja

Pemerintah Kota Depok dalam menggunakan anggaran belanja lebih besar pada anggaran belanja operasi dibandingkan dengan anggaran belanja modal. Pada tahun 2022, mengalami kenaikan anggaran belanja operasi sebesar Rp 2.669.375.630.106 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2022, belanja operasi tersebut

dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dengan komposisi Belanja Pegawai sebesar Rp 1.043.072.566.692 atau 39,08%, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.474.880.363.394 atau 55,25%, Belanja Hibah sebesar Rp 88.877.587.640 atau 3,33% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 62.545.112.380 atau 2,34% dari jumlah keseluruhan belanja operasi. Berdasarkan hasil analisis keserasian belanja tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok dalam anggaran realisasi belanjanya lebih cenderung untuk belanja operasi yang dimana untuk belanja tersebut dialokasikan pada kegiatan social kemasyarakatan.

Analisis Efisiensi Belanja

Pada tahun 2021, total realisasi anggaran belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Depok sebesar 88,9%. Sedangkan pada tahun 2022, total realisasi anggaran belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Depok sebesar 88,5%. Dalam hal ini, efisiensi belanja Pemerintah Kota Depok mengalami penurunan pada tahun 2022. Dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2022, Pemerintah Kota Depok telah melakukan efisiensi belanja dengan baik yang dapat dilihat dari rasio efisien belanja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja pada Pemerintah Kota Depok tahun 2021-2022 dapat dibuktikan dari :

1. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 terdapat kenaikan anggaran dengan nominal sebesar Rp 4.085.798.603.733 dan realisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp 3.614.127.822.783.
2. Adanya kenaikan varians belanja pada tahun 2022 sebesar 11,5% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 11,1%.
3. Rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 29,22%.
4. Pemerintah Kota Depok telah melakukan efisiensi belanja dengan baik.

Dari rangkuman yang telah dijabarkan, dapatlah diungkapkan beberapa saran yang mungkin bermanfaat untuk dipertimbangkan, sebagai berikut:

1. Untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran, penting untuk memperkuat sistem pengelolaan anggaran Kota Depok. Ini mencakup penerapan kontrol yang

- ketat, pemantauan secara teratur terhadap penggunaan anggaran, dan pemberian pelatihan kepada staf terkait untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan anggaran.
2. Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Upaya ini melibatkan penyediaan informasi yang komprehensif dan mudah diakses mengenai penggunaan anggaran, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan percaya bahwa dana publik dikelola dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, P. S., & Nursyahbani, D. (2023). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun anggaran 2019-2021. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 308–313. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1521>
- Amelia, S. A. (2022). Analisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 5(1), 76. <https://doi.org/10.32663/jaz.v5i1.2841>
- Anggraeni, C., Erina, L., & Effendi, S. (2020). Penerapan prinsip-prinsip anggaran publik pada organisasi publik di era pandemi COVID-19. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47753/pjap.v1i1.9>
- Armono, D., & Widiyaningsih, N. (2020). Analisis efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro tahun anggaran 2017-2020 Universitas Amikom Yogyakarta. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(2), 323–331.
- Bagiana, I. K. (2020). *Akuntansi sektor publik*.
- Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA). *Media Bina Ilmiah*, 17(1), 93–100.
- Dinanty, D. N., Ainiyah, N., Hartono, & Isnaini, N. F. (2023). Analisis realisasi anggaran belanja dalam mengukur kinerja keuangan dengan pendekatan value for money dan rasio keuangan di Kantor Kecamatan Gedeg periode 2017-2021. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 173-183.
- Febriana, A. B., & Narastri, M. (2023). Analisis laporan realisasi anggaran (LRA) untuk menilai pelaksanaan anggaran belanja (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 160–173.
- Arifin, J. (2017). *Akuntansi sektor publik_compressed*.

- Kaharti, E. (2019). Evaluasi prosedur penyusunan anggaran dan penetapan anggaran. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 53(1), 1689–1699.
- Pemerintah Kota Depok. (2022). *Laporan keuangan Pemerintah Kota Depok 2022*.
- Petra, B. A., & Sari, Y. P. (2021). Analisa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekobistek*, 10(1), 84–88. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i1.87>
- Sarsiti. (2017). *Akuntansi sektor publik* (Vol. 4).
- Susanti, A., Riadi, S., & Sari, D. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 5(3), 153–162.
- Yuliyanto, W., Khasanah, U., & Umami, R. (2022). Analisis efisiensi dan efektivitas anggaran APBD terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten ABC periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456–468. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.989>
- Yusni, & Ndiak, R. (2017). Analisis laporan realisasi anggaran belanja pada masa pandemi COVID-19 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai. *The New Oxford Shakespeare: Critical Reference Edition*, 7(1), 3264–3268. <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00208803>